

VALUASI EKONOMI PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT DALAM RANGKA Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI

Husen Bahasoan

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit, total produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat tajam. Pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Analisis finansial investasi perkebunan kelapa sawit skala besar layak untuk dilaksanakan karena manfaat yang diterima oleh investor lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan, sedangkan analisis ekonomi dengan turut memperhitungkan total biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi, besarnya NPV tergantung dari berapa besarnya biaya lingkungan dan biaya sosial yang mungkin terjadi. Nilai total biaya lingkungan dan biaya sosial yang sebenarnya terjadi menentukan layak tidaknya investasi perkebunan kelapa sawit. Investasi perkebunan Kelapa Sawit Tidak hanya menilai analisa kelayakan finansial saja, tetapi harus melakukan valuasi ekonomi dengan memperhitungkan biaya lingkungan dan biaya sosial.

Kata kunci: investasi, analisis finansial, analisis ekonomi, kelapa sawit.

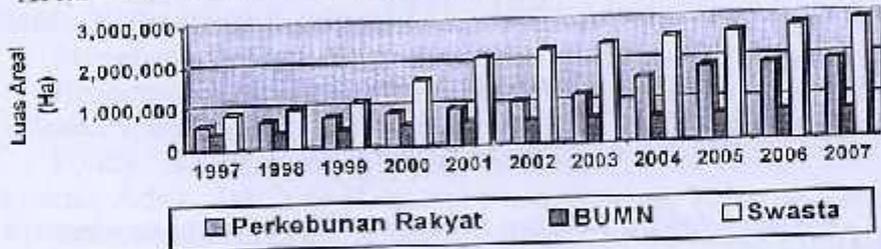
PENDAHULUAN

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu komoditi utama tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Selama 10 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar yaitu dari 1.804.149 ha pada tahun 1997 menjadi 5.447.562 ha pada tahun 2007.

Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit, total produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 2.412.612 ton pada tahun 1997 menjadi 11.806.550 ton pada tahun 2007. Begitu juga dengan nilai ekspor minyak sawit pada tahun 1997, yaitu sebesar 717 juta US\$, meningkat tajam menjadi 3,44 miliar US\$ pada tahun 2007 (Gambar 2). Produksi minyak sawit dari tahun ke tahun

Gambar 1.

Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kepemilikan, 1997-2007

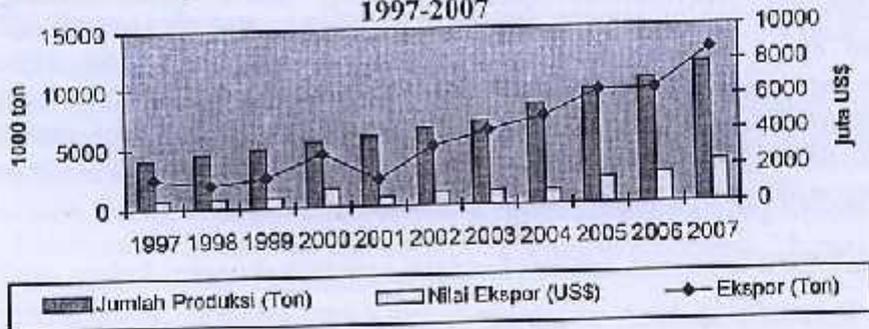


Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008

meningkat. Penurunan nilai ekspor ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor CPO dan/atau pengenaan pajak ekspor CPO yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan permintaan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Menurut data yang ada Indonesia sampai saat ini masih import minyak kelapa sawit sebesar 4.320 ton (2007).

Gambar 2.

Produksi Minyak Sawit (CPO), Jumlah Ekspor dan Nilai Ekspor, 1997-2007



Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008

Berkembangnya sub sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif. Terutama kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-Bun dan dalam perijinan pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta.

Sementara pertumbuhan sub-sektor perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan manfaat ekonomi yang penting, pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan alam tropis Indonesia. Hal ini terjadi karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi (Tabel 1).

Konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa

Tabel 1.
Luas Hutan Produksi dan Hutan Konversi yang Menjadi Areal Perkebunan

Propinsi	Hutan Produksi Yang telah dikonversi menjadi areal perkebunan (Ha)	Hutan Konversi Yang telah dikonversi menjadi areal perkebunan (Ha)
Wilayah Sumatera	297.560,91	2.006.158,57
Wilayah Jawa	-	-
Wilayah Sulawesi	14.627,83	165.729,50
Wilayah Kalimantan	118.950,62	985.863,87
Wilayah Timur Indonesia	23.870	154.311,92
TOTAL	455.009,36	3.312.063,86

Sumber : Departemen Kehutanan.

sawit terus berlangsung sampai saat ini walaupun di Indonesia sesungguhnya sudah tersedia lahan kritis dan lahan terlantar dalam skala yang sangat luas (sekitar 30 juta hektar) sebagai akibat aktifitas pembukaan dan/atau eksploitasi hutan untuk berbagai keperluan (Departemen Kehutanan). Para investor lebih suka untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan konversi karena berpotensi mendapatkan keuntungan besar berupa kayu IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dari areal hutan alam yang dikonversi. Kayu IPK sangat dibutuhkan oleh industri perkayuan, terutama industri pulp dan kertas, karena produksi kayu yang berasal dari HPH semakin berkurang dari tahun ke tahun. Sebagai akibatnya, kegiatan konversi hutan telah menjadi salah satu sumber perusakan hutan alam Indonesia, bahkan menjadi ancaman terhadap hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati ekosistem hutan hujan tropis Indonesia. Disamping itu, karena motivasi utamanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat dari kayu IPK, pelaksanaan konversi hutan alam untuk pengembangan areal perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan jutaan hektar areal hutan konversi berubah menjadi lahan terlantar berupa semak belukar dan/atau lahan kritis baru sedangkan di lain pihak realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam praktiknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga merambah ke kawasan hutan produksi, bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Praktik konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana kebakaran

hutan dan lahan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) untuk membangun perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara membakar agar cepat dan biayanya murah. Berbagai pemberitaan media massa dan hasil penelitian lapangan menyebutkan bahwa sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan berada di (berasal dari) lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan HTI. Penyebab utama kebakaran hutan tersebut diidentifikasi sebagai faktor kesengajaan oleh manusia (Santoso, 2006).

Permasalahan lainnya, pembangunan areal perkebunan kelapa sawit skala besar juga telah menyebabkan dipindahkannya masyarakat lokal yang tinggal di dalam wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit. Ganti rugi tanah pada areal pengembangan kelapa sawit tersebut seringkali menimbulkan permasalahan karena tidak dibayar dengan harga yang 'adil' dan 'wajar'. Di samping itu, sering terjadi penyerobotan lahan masyarakat adat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, padahal di atas tanah tersebut masih terdapat tanaman pertanian dan tanaman perkebunan milik masyarakat. Tindakan penyerobotan tanah masyarakat adat ini dilakukan baik secara halus maupun dengan cara paksaan, misalnya dengan cara pembakaran lahan yang telah diorganisir dengan baik oleh pihak perusahaan. Sebagai akibatnya, seringkali timbul permasalahan klaim lahan oleh masyarakat setempat terhadap areal perkebunan kelapa sawit yang sedang/telah dibangun. Berbagai permasalahan ini telah menyulut permasalahan konflik sosial yang berkepanjangan dan sangat merugikan semua pihak, terutama bagi masyarakat yang mengalami dampak negatif akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit, sehingga biaya sosial yang harus dikeluarkan menjadi sangat tinggi. Konflik sosial yang terjadi akhirnya menjadi sumber risiko dan ketidakpastian bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan bisnis usahanya secara berkelanjutan.

Biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi seharusnya turut diperhitungkan dalam analisis investasi perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, perusahaan perkebunan swasta tidak pernah memasukan biaya lingkungan dan biaya sosial ini dalam analisis finansial pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini terjadi karena biaya-biaya lingkungan dan sosial yang timbul tidak ditanggung (dibayar) oleh perusahaan perkebunan pada saat melakukan investasi. Biaya yang terjadi sebagai akibat munculnya konflik sosial berkepanjangan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat akan dibayar dengan mahal oleh perusahaan setelah kegiatan bisnis perkebunan kelapa sawit berjalan.

Sementara itu, masyarakat (khususnya masyarakat setempat) yang mengalami dampak negatif dari keberadaan pembangunan perkebunan kelapa sawit, merupakan pihak yang menanggung biaya

sosial dan biaya lingkungan yang terjadi sejak awal dimulainya pembangunan perkebunan kelapa sawit. Semua biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi sesungguhnya menjadi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat/negara Indonesia, bahkan turut ditanggung oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dan khususnya para pengambil keputusan di pemerintahan dalam mengevaluasi (menilai) analisis biaya dan manfaat pembangunan pembangunan perkebunan kelapa sawit harus turut memperhitungkan berbagai biaya lingkungan dan biaya sosial tersebut.

Permasalahan yang terjadi adalah 1.) Bagaimana kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi pembangunan kebun kelapa sawit sebagai salah satu alternatif pilihan penggunaan lahan? 2) Bagaimana keragaan besarnya biaya lingkungan dan sosial sebagai pertimbangan proses keputusan pembangunan kebun kelapa sawit?

3) Bagaimana keragaan kebun kelapa sawit dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi?

Secara umum penulisan ini bertujuan mengkaji pembangunan kebun kelapa sawit di Indonesia, dan secara spesifik bertujuan : 1) Menganalisis kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi pembangunan kebun kelapa sawit sebagai salah satu alternatif pilihan penggunaan lahan. 2) Menganalisis besar biaya lingkungan dan biaya sosial sebagai pertimbangan proses keputusan pembangunan kebun kelapa sawit. 3) Keragaan kebun kelapa sawit dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

PERKEMBANGAN INDUSTRI / KEBUN KELAPA SAWIT

Perkembangan Industri Kelapa Sawit di Indonesia.

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu komoditi utama tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Selama 10 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit yaitu dari 1.804.149 ha pada tahun 1997 menjadi 5.447.562 ha pada tahun 2007.

Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit, total produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 2.412.612 ton pada tahun 1997 menjadi 11.806.550 ton pada tahun 2007. Begitu juga dengan nilai ekspor minyak sawit pada tahun 1997, yaitu sebesar 717 juta US\$, meningkat tajam menjadi 3,44 miliar US\$ pada tahun. Berkembangnya sub sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang

memberikan berbagai insentif. Terutama kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-Bun dan dalam perijinan pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta. Permintaan domestik terhadap komoditas minyak kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun karena meningkatnya penduduk dan konsumsi minyak goreng dalam negeri per kapita. Menurut Husin (2006), jika tahun 1998, kebutuhan minyak sawit mencapai 2,60 juta ton/tahun atau kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebesar 9,40 kg/kapita/tahun, maka pada tahun 2010 diperkirakan kebutuhan minyak sawit akan meningkat menjadi 3,40 juta ton/tahun akibat kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang juga meningkat menjadi 13,00 kg/kapita/tahun.

Secara umum dapat diindikasikan bahwa pengembangan agribisnis kelapa sawit masih mempunyai prospek, ditinjau dari prospek harga, ekspor dan pengembangan produk. Secara internal pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung oleh potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas yang masih dapat meningkat dan semakin berkembangnya industri hilir. Dengan prospek dan potensi ini, maka arah pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah pemberdayaan di hulu dan penguatan di hilir. Adapun luasan areal perkebunan kelapa sawit per propinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 3 dan 4.

Total biaya per tahun untuk pelaksanaan kegiatan industri kelapa sawit merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran dalam kurun waktu tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di antaranya adalah biaya untuk: (a) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit, (b) investasi tanaman kelapa sawit, (c) pemeliharaan tanaman, (d) pemancaran TBS, (e) pemupukan, (f) pengangkutan TBS ke pabrik pengolahan, (g) investasi pembangunan pabrik, (h) biaya pengolahan TBS menjadi CPO dan minyak inti sawit (PK), (i) biaya pengangkutan CPO dan PK dari lokasi PKS ke pelabuhan ekspor, (j) biaya *overhead* dan (k) biaya depresiasi.

Pengeluaran biaya pembangunan dimulai dari tahun ke-0, yaitu mulai dari tahapan pengurusan ijin HGU dan pembukaan lahan, biaya pada tahun ke-1 berupa biaya investasi tanaman kelapa sawit, dan berbagai pengeluaran biaya lainnya, sesuai dengan rencana kegiatan pembangunan. Total manfaat per tahun yang diterima dari pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit merupakan penjumlahan dari semua penerimaan dalam kurun waktu satu tahun tertentu, selama jangka waktu umur kegiatan. Penerimaan dalam nilai uang, diperoleh dari hasil penjualan CPO dan PK yang dijual di pasar domestik maupun yang diekspor. Tanaman kelapa sawit baru mulai menghasilkan TBS pada

tahun ke-4 (*gestation period* 3 tahun), sehingga penerimaan pembangunan dari hasil penjualan CPO dan PK baru mulai dihasilkan pada tahun ke-4.

Beberapa hal yang dapat memacu pengembangan industri kelapa sawit adalah produsen dapat akses kredit dengan tingkat bunga ringan, memperluas areal tanaman dengan membuka lahan baru, yaitu mengkonversi hutan tidak produktif menjadi areal kebun kelapa sawit, pemahaman bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan penyerap tenaga kerja dan menambah devisa negara, adanya upaya kemitraan antara petani pekebun lokal dengan perusahaan mitra, hal ini akan berdampak timbulnya rasa memiliki oleh pekebun terhadap kebun miliknya dan kebun akan terjaga sehingga pengelolaan kebun akan terjamin.

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan minyak sawit (CPO) adalah karena adanya: (a). perubahan kebijakan yang menargetkan luasan areal kelapa sawit, (b). gejolak sosial akibat adanya investor asing, (c). perubahan sistem distribusi, (d). perubahan status kepemilikan, (e). peristiwa *el nino*, (f). menurunnya produksi CPO dunia, (g). biaya produksi meningkat.

VALUASI EKONOMI PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT

Valuasi Ekonomi

Menurut Barbier *et. al.* (1997), ada 3 jenis pendekatan penilaian sebuah ekosistem alam yaitu (1) *impact analysis*, (2) *partial analysis* dan (3) *total valuation*. Pendekatan *impact analysis* dilakukan apabila nilai ekonomi ekosistem dilihat dari dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari aktivitas tertentu, misalnya akibat reklamasi pantai terhadap ekosistem pesisir. Sedangkan *partial analysis* dilakukan dengan menetapkan dua atau lebih alternatif pilihan pemanfaatan ekosistem. Sementara itu, *total valuation* dilakukan untuk menduga total kontribusi ekonomi dari sebuah ekosistem tertentu kepada masyarakat.

Nilai ekonomi (*economic value*) dari suatu barang atau jasa diukur dengan menjumlahkan kehendak untuk membayar (KUM, *willingness to pay*, WTP) dari banyak individu terhadap barang atau jasa yang dimaksud. Pada gilirannya, KUM merefleksikan preferensi individu untuk suatu barang yang dipertanyakan. Jadi dengan demikian, valuasi ekonomi dalam konteks lingkungan hidup adalah tentang pengukuran preferensi dari masyarakat (*people*) untuk lingkungan hidup yang baik dibandingkan terhadap lingkungan hidup yang jelek. Valuasi merupakan fundamental untuk pemikiran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Hal yang sangat penting untuk dimengerti adalah, apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan valuasi ekonomi.

Hasil dari valuasi dinyatakan dalam nilai uang (*money terms*)

sebagai cara dalam mencari *preference revelation*, misalnya dengan menanyakan "apakah masyarakat berkehendak untuk membayar?". Lebih lanjut dinyatakan bahwa penggunaan nilai uang memungkinkan membandingkan antara "nilai lingkungan hidup (*environmental values*)" dan "nilai pembangunan (*development values*)" (CSERGE, 1994).

Dalam pasar, individual mempraktekkan pilihan dengan membandingkan KUM mereka dengan harga produk. Mereka akan membeli barang apabila KUM-nya melebihi harga, dan tidak berlaku sebaliknya. Perhitungan nilai (*imputing values*) melibatkan temuan beberapa ukuran dari KUM untuk kualitas lingkungan.

Iniilah secara esensial sebagai proses dari valuasi ekonomi yaitu melibatkan temuan suatu ukuran KUM dalam menghadapi hambatan di mana kegagalan pasar tidak dapat memberikan harga secara langsung. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah bagaimana menilai suatu sumberdaya alam secara komprehensif. Dalam hal ini tidak saja *market value* dari barang yang dihasilkan dari suatu sumberdaya melainkan juga jasa yang ditimbulkan oleh sumberdaya tersebut.

Nilai Ekonomi Total (NET) adalah nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumberdaya alam, baik nilai guna maupun nilai fungsional yang harus diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pengelolaannya sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya dapat ditentukan secara benar dan mengenai sasaran. Nilai Ekonomi Total ini dapat dipecah-pecah ke dalam suatu set bagian komponen. Sebagai ilustrasi misalnya dalam konteks penentuan alternatif penggunaan lahan dari ekosistem terumbu karang. Berdasarkan hukum biaya dan manfaat (*a benefit-cost rule*), keputusan untuk mengembangkan suatu ekosistem terumbu karang dapat dibenarkan (*justified*) apabila manfaat bersih dari pengembangan ekosistem tersebut lebih besar dari manfaat bersih konservasi. Jadi dalam hal ini manfaat konservasi diukur dengan NET dari ekosistem terumbu karang tersebut. NET ini juga dapat diinterpretasikan sebagai NET dari perubahan kualitas lingkungan hidup.

Nilai Ekonomi Total atau Total Economic Value (TEV) dapat ditulis dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (XV + BV)$$

Dimana:

TEV = Total economic value

UV = Use values (Nilai Manfaat).

NUV = Non-use value (Nilai Bukan Manfaat)

DUV = Direct use value (Nilai Langsung)

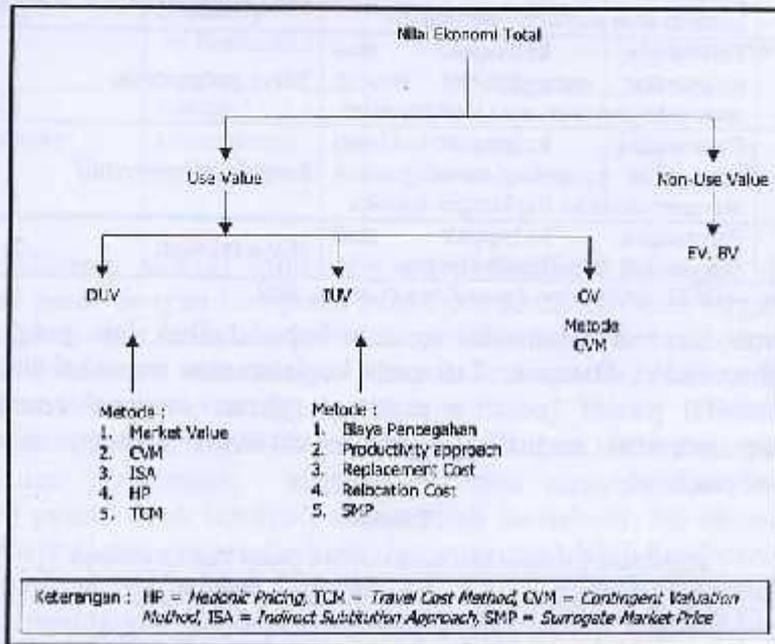
IUV = Indirect use value (Nilai Tidak Langsung)

OV = *Option value* (Nilai Pilihan)

XV = *Existence value* (Nilai Keberadaan)

BV = *Bequest value* (Nilai Warisan)

Untuk lebih jelasnya taksonomi ekonomi untuk valuasi sumberdaya lingkungan dapat dikaji pada Gambar 3.



Gambar 3.

Taksonomi ekonomi untuk valuasi sumberdaya lingkungan

Dari Gambar di atas dapat dianalisis lebih lanjut bahwa TEV dari sumberdaya dapat diagregasi ke dalam dua bagian yang terdiri dari *Use Value* (UV) dan *Non-Use Value* (NUV).

Perubahan pada lingkungan akan merubah kegiatan ekonomi sehingga berdampak pada perubahan biaya dan pendapatan secara moneter. Perubahan dalam biaya dan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk menilai perubahan lingkungan. Ada banyak teknik valuasi lingkungan dengan metode valuasi pasar, diantaranya seperti yang dikemukakan Anwar dan Asikin (2001), mencatat ada lima teknik. Secara umum, teknik-teknik yang digunakan dapat digambarkan dalam Tabel 2 berikut :

Eksternalitas

Eksternalitas merupakan dampak yang diterima oleh beberapa pihak sebagai akibat kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi atau transaksi yang dilakukan oleh pihak lain. Eksternalitas dapat disebut juga sebagai efek limpahan atau efek kepada pihak ketiga, artinya ada

Tabel 2.

Pendekatan Teknik Valuasi Ekonomi Lingkungan dengan Metode Valuasi Pasar

No.	Efek Perubahan	Teknik Valuasi
1.	Perubahan dalam ketersediaan, kualitas, atau kuantitas dari output	Perubahan dalam produktivitas
2.	Perubahan dalam ketersediaan, kualitas atau kuantitas dari input	Perubahan dalam pendapatan
3.	Perorangan, kelompok atau masyarakat menggantikan seluruh aset, sebagian aset, atau kualitas aset	Biaya penggantian
4.	Perorangan, kelompok atau masyarakat mengeluarkan uang untuk mempertahankan lingkungan mereka	Pengeluaran preventif
5.	Perorangan, kelompok atau masyarakat merelokasi aktivitas	Biaya relokasi

Sumber : ADEST, 1996 dalam Anwar J dan M Asikin, 2001.

pengaruh dari suatu transaksi tertentu kepada pihak lain yang tidak terlibat transaksi. Dampak dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa bersifat positif (*positive external effects, external economic*) maupun bersifat negatif (*negative external effects, external diseconomic*).

Tabel 3.

Klasifikasi Eksternalitas Berdasarkan Dasar Pendekatannya

No	Dasar Pendekatan	Klasifikasi Eksternalitas
1.	Dampak	(1) <i>Negative Externality/ External Diseconomy</i> /eksternalitas yang merugikan (2) <i>Positive Externality/ External Economy</i> /eksternalitas yang menguntungkan
2.	Jenis Kegiatan	(1) <i>Eksternal of Production</i> (2) <i>Eksternal of Consumption</i> (3) <i>Eksternal of Distribution</i>
3.	Keberadaan	(1) <i>Ownership Externality</i> /eksternalitas (2) Kepemilikan (3) <i>Technical Externality</i> /eksternalitas teknik <i>Public Goods Externality</i> /eksternalitas barang public

Eksternalitas kepemilikan adalah kaitan antara eksternalitas berdasar dampak yang ditimbulkan karena jenis kegiatan, sedangkan eksternalitas teknis terkait dengan skala usaha. Kalau perusahaan dalam kondisi IRTS (*increasing return to scale*) pada pasar persaingan sempurna, artinya *average cost* (AC) lebih besar dari pada *marginal cost* (MC).

Klasifikasi Eksternalitas berdasarkan Dampak dan Jenis Kegiatan. Berdasarkan dampak dan jenis kegiatan, eksternalitas dapat diklasifikasikan seperti terlihat pada Tabel 4 berikut.

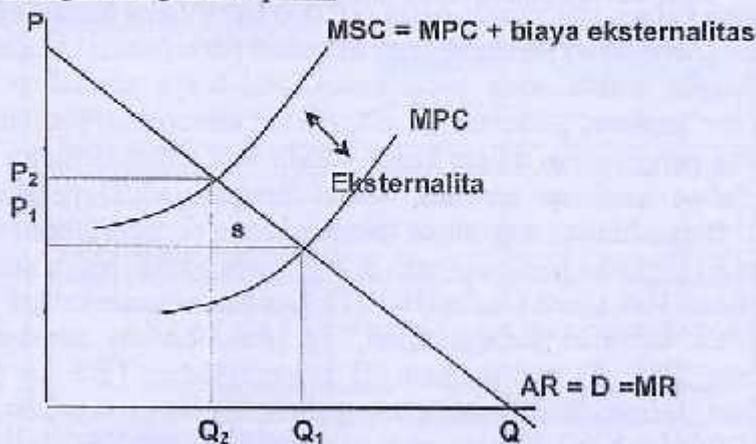
Tabel 4.
Kaitan Antara Klasifikasi Eksternalitas Berdasarkan Dampak dan Jenis Kegiatan

Dampak	Berdasarkan Kegiatan		
	Produksi	Konsumsi	Distribusi
External Economy	External Economy of Production	External Economy of Consumption	External Economy of Distribution
External Diseconomy	External Diseconomy of Production	External Diseconomy of Consumption	External Diseconomy of Distribution

Efisiensi alokasi sumberdaya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar dengan kompetisi bebas dan sempurna bisa terganggu, jika aktivitas dan tindakan individu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai dampak (*externality*) baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap pihak lain.

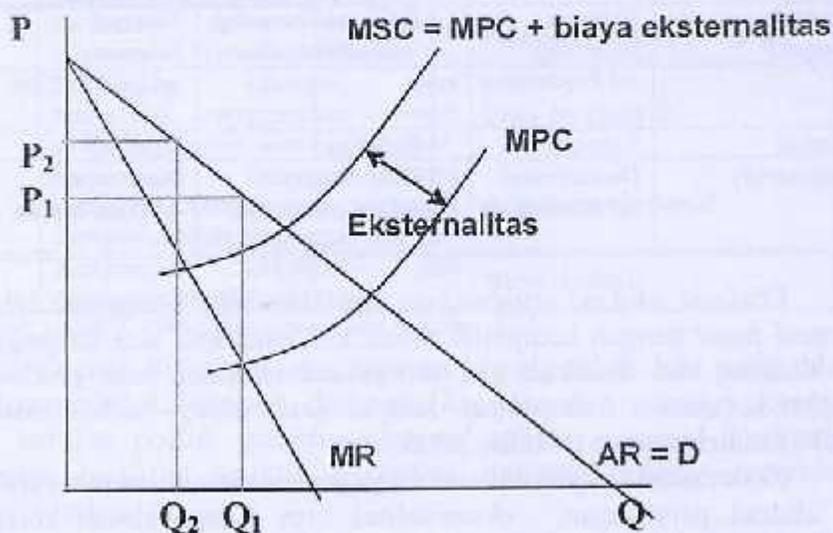
Eksternalitas terjadi akibat adanya perbedaan ukuran masyarakat dan ukuran perorangan, eksternalitas bisa menyebabkan kondisi optimasi pareto tidak tercapai, akan terjadi inefisiensi, ini akibat dari biaya marginal perorangan (*marginal private cost*) lebih kecil dari pada biaya marginal masyarakat (*marginal social cost*), artinya perusahaan tidak mengeluarkan biaya eksternalitas (eksternalitas negatif), dengan kata lain *private benefit* lebih besar dari pada *social benefit* atau *private cost* lebih kecil dari pada *social cost*. Kondisi optimal pareto tercapai apabila biaya marginal perorangan (*marginal private cost*) sama dengan biaya marginal masyarakat (*marginal social cost*) dan *marginal private benefit* sama dengan *marginal social benefit*.

Penentuan Output Sebagai Dampak Adanya Eksternalitas.
Pada pasar persaingan sempurna



Harga awal sebesar P_1 , tetapi setelah ada biaya eksternalitas, maka tingkat harga meningkat menjadi P_2 .

Pada pasar monopoli



Harga awal sebesar P_1 , tetapi setelah ada biaya eksternalitas, maka tingkat harga meningkat menjadi P_2 .

ANALISIS PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT

Kelayakan Finansial Dan Kelayakan Ekonomi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.

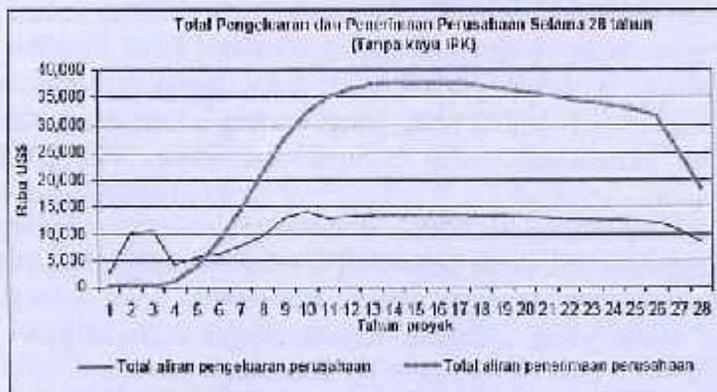
Semua biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit diidentifikasi dan dicatat secara rinci, setiap tahun, selama waktu yang telah ditentukan. Biaya dan manfaat pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar (10.000 ha) selama umur kegiatan. Aliran kas (*cash-flow*) pembangunan investasi perkebunan kelapa sawit selama jangka waktu umur perkebunan. Total biaya per tahun untuk pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di antaranya adalah biaya untuk: 1) Mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit, 2) investasi tanaman kelapa sawit, 3) pemeliharaan tanaman, 4) pemanenan TBS, 5) pemupukan, 6) pengangkutan TBS ke pabrik pengolahan, 7) investasi pembangunan pabrik, 8) biaya pengolahan TBS menjadi CPO dan KPO, 9) biaya pengangkutan CPO dan KPO dari lokasi

PKS ke pelabuhan ekspor, 10) biaya *overhead*, dan 11) biaya depresiasi. Pengeluaran biaya pembangunan dimulai dari tahun ke-0, yaitu mulai dari tahapan pengurusan ijin HGU dan pembukaan lahan; biaya pada tahun ke-1 berupa biaya investasi tanaman kelapa sawit, dan berbagai pengeluaran biaya lainnya, sesuai dengan rencana kegiatan pembangunan. Total manfaat per tahun yang diterima dari pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit merupakan penjumlahan dari semua penerimaan dalam kurun waktu satu tahun tertentu, selama jangka waktu umur kegiatan. Penerimaan dalam nilai uang, diperoleh dari hasil penjualan CPO dan KPO yang dijual di pasar domestik maupun yang diekspor. Tanaman kelapa sawit baru mulai menghasilkan TBS pada tahun ke-4 (*gestation period* 3 tahun), sehingga penerimaan pembangunan dari hasil penjualan CPO dan KPO baru mulai dihasilkan pada tahun ke-4.

Pada periode investasi tanaman kelapa sawit dan masa investasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS), yaitu pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3, perusahaan harus mengeluarkan biaya investasi dan belum memperoleh penerimaan. Selanjutnya, dari hasil analisis data diketahui bahwa penerimaan total perusahaan yang berasal dari penjualan CPO dan KPO, mulai tahun ke-4 kisaran nilainya sebesar US\$ 105 - \$3.718/ha/tahun. Dengan total biaya produksi selama jangka waktu umur kegiatan yang berkisar antara : US\$ 478 - \$1353/ha/tahun.

Sangat penting untuk diperhatikan bahwa dalam perhitungan analisis finansial investasi perkebunan kelapa sawit, penerimaan dari kayu IPK tidak dimasukkan sebagai bagian dari manfaat yang diterima oleh perusahaan. Pada bagian-bagian lain dari makalah ini, keuntungan perusahaan yang berasal dari hasil penjualan kayu IPK akan turut diperhitungkan sebagai bagian dari penerimaan yang diperoleh perusahaan.

Gambar 4 .
Total Pengeluaran dan Penerimaan Perusahaan



Sumber: Departemen Kehutanan

Keseluruhan manfaat yang dihasilkan selama jangka waktu umur kegiatan lebih besar daripada keseluruhan biaya investasi, maka nilai NPV positif. Artinya, kegiatan secara finansial layak untuk dilaksanakan karena dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis finansial, dengan tingkat suku bunga diskonto (*discount rate*) sebesar 10%, pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar (10.000 ha) memberikan nilai NPV sebesar US\$ 72,62 juta (dan nilai IRR sebesar 26,35%). Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit skala besar (walaupun tidak memasukan penerimaan/keuntungan perusahaan dari hasil penjualan kayu IPK) secara finansial sangat menguntungkan.

Bila penerimaan perusahaan yang berasal dari kayu IPK turut diperhitungkan dalam analisis finansial maka nilai NPV pembangunan perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi US\$ 93,62 juta. Jadi, penerimaan perusahaan bertambah sebesar US\$ 21 juta, yaitu keuntungan bersih dari hasil penjualan kayu IPK yang berasal dari areal hutan konversi seluas 10.000 ha.

Keuntungan perusahaan perkebunan kelapa sawit semakin bertambah karena rata-rata sebesar 70% dari total modal investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berasal dari pinjaman bank. Perusahaan biasanya meminjam modal dari bank walaupun telah memperoleh cukup dana dari keuntungan kayu IPK.

Besarnya keuntungan yang diterima dari kayu IPK ternyata telah menyebabkan banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit menelantarkan lahan HGU-nya setelah mendapatkan kayu IPK. Realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Berbeda dengan analisis finansial, dalam analisis valuasi ekonomi berbagai biaya lingkungan dan biaya sosial yang mungkin atau potensial terjadi turut diperhitungkan dalam menilai kelayakan investasi suatu kegiatan. Kriteria kelayakan investasi tetap sama, yaitu berdasarkan NPV. Biaya lingkungan dan biaya sosial yang diperhitungkan pada awalnya adalah *high value* (Tabel 5). NPV dalam analisis valuasi ekonomi (pada tingkat suku bunga diskonto = 10%) sebesar minus US\$ 55,54 juta, yang berarti investasi tidak layak. Keuntungan perusahaan yang berasal dari kayu IPK telah turut diperhitungkan. Selanjutnya, bila besarnya biaya lingkungan dan biaya sosial yang diperhitungkan adalah *reasonable minimum value* investasi pembangunan menjadi layak karena NPV berubah menjadi positif, yaitu US\$ 53,73 juta. Dengan demikian, berapa besarnya biaya lingkungan dan biaya sosial yang mungkin terjadi sangat mempengaruhi hasil perhitungan NPV, atau menentukan layak tidaknya suatu investasi.

Bila dibandingkan dengan besarnya NPV hasil analisis finansial

(yaitu US\$ 93,62 juta; keuntungan perusahaan dari kayu IPK turut diperhitungkan), maka NPV hasil perhitungan analisis valuasi ekonomi mengalami pengurangan sebesar US\$ 40 juta sampai US\$ 149 juta, tergantung dari besarnya biaya lingkungan dan biaya sosial yang (sesungguhnya) terjadi.

Selanjutnya, karena besarnya biaya lingkungan dan biaya sosial yang sesungguhnya sulit diukur/diketahui dengan tepat dan pasti maka dilakukan pendekatan analisis pulang pokok (*break-even analysis*) untuk mengetahui berapa nilai total biaya lingkungan dan biaya sosial yang menjadikan nilai NPV perkebunan kelapa sawit sama dengan nol. Bila NPV sama dengan nol berarti investasi pembangunan tersebut hanya menghasilkan pulang pokok saja, atau tidak memberikan keuntungan atau kerugian finansial bagi investor.

Biaya Lingkungan dan Biaya Sosial

Besarnya biaya lingkungan dibedakan menjadi *high value* dan *low value*. *High value* diperoleh berdasarkan metoda *benefit transfer* di beberapa negara (Ruitenbeck, 1999; Constanza, 1997). *Low value* dan persentase "*trust*" factor adalah asumsi yang dibuat berdasarkan kondisi di Indonesia untuk mendapatkan *reasonable minimum values* dari biaya lingkungan dan biaya sosial (Tabel 5). Selanjutnya, *reasonable minimum values* ini dipergunakan dalam perhitungan analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan kelapa sawit. Berbagai biaya lingkungan yang terjadi dalam kenyataannya selama ini tidak pernah diperhitungkan sebagai biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi tidak pernah turut dihitung dalam analisis finansial perkebunan kelapa sawit.

Manfaat guna langsung yang dapat diperoleh dari ekosistem hutan alam di antaranya adalah: hasil hutan kayu, hasil hutan non-kayu, dan jasa rekreasi alam; sedangkan yang termasuk dalam manfaat guna tidak langsung adalah manfaat yang berhubungan dengan fungsi ekologis (*eco-function*) yang dapat diberikan oleh suatu ekosistem hutan alam. Diantaranya adalah: pengendali gangguan (*disturbance regulation*), pengaturan dan penyediaan air (*water supply/regulation*), mengendali erosi tanah (*erosion control*), pembentukan lapisan tanah (*soil formation*), siklus hara (*nutrient cycling*), dan perlakuan pemrosesan limbah (*waste treatment*).

Biaya-biaya lingkungan lainnya yang timbul akibat dikonversinya hutan alam menjadi areal perkebunan kelapa sawit dapat disebabkan oleh: 1) hilangnya keanekaragaman hayati, 2) terjadinya polusi, misalnya pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida dalam budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, serta pencemaran bahan kimia cair yang berasal dari proses pengolahan TBS

menjadi CPO/KPO, 3) hilangnya kemampuan hutan untuk menyerap karbon, dan 4) penyebaran hama dan penyakit tanaman karena hutan alam dikonversi menjadi tanaman monokultur.

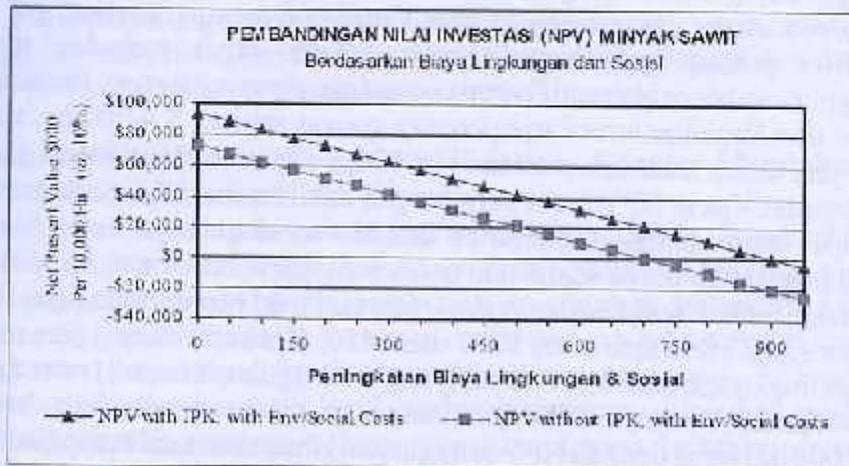
Hutan alam juga dapat menghasilkan manfaat berupa nilai pilihan (*option value*), nilai budaya (*cultural value*) dan nilai warisan (*bequest value*). Berbagai manfaat ini tergolong ke dalam manfaat yang sulit diukur nilainya dengan uang (*intangible benefits*). Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat hilangnya manfaat yang bersifat *intangibles* ini digolongkan kedalam *intangible costs*.

Konflik lahan sering terjadi karena areal HGU perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha perkebunan (berdasarkan surat ijin resmi pemerintah) ternyata berada di dalam areal yang diklaim oleh masyarakat sebagai areal tanah miliknya, atau berada pada areal lahan hak ulayat (hak komunal) masyarakat adat. Akar masalah konflik lahan ini utamanya disebabkan karena pemerintah dalam menetapkan (membuat) tata guna lahan tidak pernah melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat atas suatu areal lahan tertentu yang sesungguhnya sejak lama telah menjadi hak ulayat (hak komunal) masyarakat adat seringkali tidak diindahkan (diakui) oleh pemerintah. Akibatnya klaim lahan perkebunan oleh masyarakat terjadi di berbagai lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit, khususnya pada areal perkebunan kelapa sawit skala besar (Wahyono, 2004).

Biaya sosial yang harus dibayar oleh suatu perusahaan juga dapat disebabkan oleh semakin mahalnya biaya premi yang harus dibayar oleh perusahaan. Misalnya, untuk meminjam modal investasi perkebunan kelapa sawit, sebagai akibat risiko usaha yang tinggi, perusahaan terpaksa harus membayar biaya premi risiko yang tinggi (*high risk premium*).

Gambar 5 memperlihatkan grafik analisis pulang pokok perkebunan kelapa sawit skala besar, yaitu besarnya NPV setelah dikurangi dengan biaya lingkungan dan biaya sosial yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Berdasarkan analisis finansial (total biaya lingkungan dan biaya sosial dianggap nol), besarnya NPV tanpa penerimaan kayu IPK sebesar US\$ 72,62 juta, sedangkan besarnya NPV dengan memperhitungkan penerimaan kayu IPK sebesar US\$ 93,62 juta. Besarnya NPV semakin berkurang dengan semakin meningkatnya total biaya lingkungan dan biaya sosial. Total biaya lingkungan dan biaya sosial diasumsikan semakin meningkat nilainya, yaitu mulai dari nol dan selanjutnya meningkat dengan interval sebesar US\$ 50/ha, sampai nilai NPV investasi perkebunan kelapa sawit hasil perhitungan analisis finansial sama dengan nol.

Gambar 5.
Grafik Analisis Pulang Pokok pada Kisaran Biaya Lingkungan dan Biaya Sosial



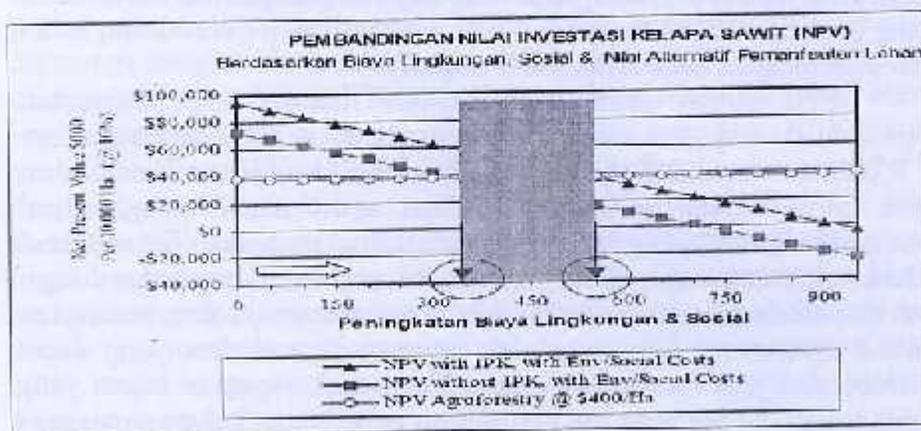
Besarnya NPV (dengan memperhitungkan penerimaan dari kayu IPK) mencapai nilai nol pada saat total biaya lingkungan dan biaya sosial sebesar \$900/ha. Bila penerimaan dari kayu IPK tidak diperhitungkan, NPV mencapai nilai nol pada saat total biaya lingkungan dan biaya sosial sebesar \$700/ha. Kesimpulannya, jika total biaya lingkungan dan biaya sosial sebesar \$900 investasi pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar (10.000 ha) mencapai titik pulang pokok (*break-even point*).

Dengan demikian, bila *reasonable minimum value* (yaitu US \$458, lebih kecil dari \$900) dipercaya sebagai total biaya lingkungan dan biaya sosial yang (sesungguhnya) terjadi dan harus dibayar oleh perusahaan, maka investasi perkebunan kelapa sawit skala besar secara finansial layak (NPV positif). Tetapi, bila *high value* (yaitu US \$ 2.305, lebih besar dari \$900) merupakan total biaya lingkungan dan biaya sosial yang (sesungguhnya) terjadi dan harus dibayar oleh perusahaan, maka investasi menjadi tidak layak (NPV negatif).

Berdasarkan perhitungan analisis finansial pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar menghasilkan NPV berkisar antara \$ 7.262/ha sampai \$ 9.362/ha. Dengan demikian, pemanfaatan lahan (per hektar) untuk perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan pendapatan (NPV) yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan lahan untuk *mixed agroforestry system*. Namun demikian, harus diingat bahwa perkebunan kelapa sawit adalah tanaman monokultur, sedangkan *mixed agroforestry system* adalah tanaman heterokultur yang dapat memberikan jasa *eco-function* dan nilai keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Di samping itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga harus (tetap) menanggung biaya sosial yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, analisis pulang pokok untuk nilai penggunaan lahan alternatif perlu dilakukan untuk mengetahui berapa besar total biaya lingkungan dan biaya sosial yang membuat NPV perkebunan kelapa sawit sama dengan NPV dari penggunaan lahan alternatif, misalnya *mixed agroforestry system*. Gambar 6 memperlihatkan grafik analisis pulang pokok perkebunan kelapa sawit terhadap nilai penggunaan lahan alternatif berupa *mixed agroforestry system*. Besarnya NPV dari kegiatan *mixed agroforestry system* sebesar \$ 4.000/ha, atau \$40 juta untuk arcal lahan seluas 10.000 ha, digambarkan sebagai garis horizontal. Garis NPV hasil perhitungan analisis finansial perkebunan kelapa sawit semakin menurun dengan meningkatnya total biaya lingkungan dan biaya sosial dan memotong garis horizontal NPV dari kegiatan *mixed agroforestry system* pada saat total biaya lingkungan dan biaya sosial mencapai nilai \$350 dan \$550. Kesimpulannya, jika total biaya lingkungan dan biaya sosial (yang sesungguhnya terjadi) mencapai \$550 maka besarnya NPV pembangunan kelapa sawit skala besar (10.000 ha) sama dengan NPV penggunaan lahan alternatif berupa *mixed agroforestry system*. Selanjutnya perbandingan NPV berdasarkan dua alternatif penggunaan lahan tersebut memperlihatkan bahwa besarnya total biaya lingkungan dan biaya sosial yang menyebabkan investasi perkebunan kelapa sawit menjadi tidak layak semakin mengecil, yaitu turun dari \$ 900 menjadi \$550. Bila *reasonable minimum value* (yaitu US \$458; lebih kecil dari \$550) dipercaya sebagai total biaya lingkungan dan biaya sosial yang (sesungguhnya) terjadi dan harus dibayar oleh perusahaan, maka investasi perkebunan kelapa sawit skala besar layak untuk dilaksanakan (NPV positif).

Gambar 6.
Grafik Analisis Pulang Pokok terhadap Nilai Penggunaan Lahan Alternatif Berupa *Mixed Agroforestry System*



Perkebunan kelapa sawit perlu diprioritaskan untuk dibangun pada areal lahan yang tidak produktif, karena di samping menghasilkan NPV yang lebih besar dibandingkan dengan nilai penggunaan lahan alternatif, pembangunan perkebunan kelapa sawit pada areal lahan yang tidak produktif juga bermanfaat untuk merehabilitasi lahan. Dengan demikian akan menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi dan dapat memperbaiki kualitas lingkungan.

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia saat ini ditunjang dari berbagai sektor, masing-masing sektor menunjukkan hasil yang meningkat yang merupakan kontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang diukur dengan GDP. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor perkebunan, perikanan, peternakan, hortikultura dan tanaman pangan. Walaupun sektor pertanian nampak kecil perkembangannya dibanding sektor industri, namun ternyata sektor pertanian mampu bertahan di saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, oleh karena kinerjanya yang dapat memberikan kontribusi besar pada saat Indonesia terpuruk, maka sektor pertanian mempunyai peluang untuk dapat berkembang membawa masyarakat Indonesia menjadi sejahtera di masa yang akan datang.

Salah satu sub sektor dalam sektor pertanian yang mempunyai potensi tinggi yang dimiliki oleh sebagian besar propinsi di Indonesia ini adalah sub sektor perkebunan. Sektor pertanian memberikan kontribusi kepada GDP nasional sebesar 2,46% dan sub sektor perkebunan memberikan kontribusi 16,19% terhadap sektor pertanian. Prospek komoditi perkebunan sangat mendukung terhadap pendapatan petani Indonesia, dengan produktivitas meningkat, maka akan memberikan peningkatan pendapatan petani. Sub sektor perkebunan dalam perekonomian Indonesia mempunyai peranan strategis yaitu penyerap tenaga kerja, penyedia pangan, penopang pertumbuhan industri manufaktur dan sebagai sumber devisa negara. Pengembangan sub sektor perkebunan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, pemerataan, dinamika ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan dalam bentuk kegiatan agribisnis maupun agroindustri.

Permintaan domestik terhadap komoditi minyak kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun karena meningkatnya penduduk dan konsumsi minyak goreng dalam negeri per kapita. Menurut Husin (2006) jika tahun 1998, kebutuhan minyak sawit mencapai 2,60 juta ton/tahun atau kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebesar 9,40 kg/kapital/tahun, maka pada tahun 2010 diperkirakan kebutuhan minyak sawit akan meningkat menjadi 3,40 juta ton/tahun akibat kebutuhan

minyak goreng dalam negeri yang juga meningkat menjadi 13,00 kg/kapita/tahun.

Total biaya per tahun untuk pelaksanaan kegiatan industri kelapa sawit merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran dalam kurun waktu tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di antaranya adalah biaya untuk: (1) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit, (2) investasi tanaman kelapa sawit, (3) pemeliharaan tanaman, (4) pemanenan TBS, (5) pemupukan, (6) pengangkutan TBS ke pabrik pengolahan, (7) investasi pembangunan pabrik, (8) biaya pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, (9) biaya pengangkutan CPO dan PK dari lokasi PKS ke pelabuhan ekspor, (10) biaya *overhead*, dan (11) biaya depresiasi.

Beberapa hal yang dapat memacu pengembangan industri kelapa sawit adalah produsen dapat akses kredit dengan tingkat bunga ringan, memperluas areal tanaman dengan membuka lahan baru, yaitu mengkonversi hutan tidak produktif menjadi areal kebun kelapa sawit, pemahaman bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan penyerap tenaga kerja dan menambah devisa negara, adanya upaya kemitraan antara petani pekebun lokal dengan perusahaan mitra, hal ini akan berdampak timbulnya rasa memiliki oleh pekebun terhadap kebun miliknya dan kebun akan terjaga dan pengolaannya akan terjamin.

Bicara mengenai produk turunan ini, maka perlu ada perhatian yang serius dari Harga minyak sawit di pasar internasional berfluktuasi setiap saat, namun menurut bank dunia harga minyak sawit di pasaran dalam beberapa tahun yang akan datang cukup baik bila dibandingkan dengan tingkat harga rata-rata yang berlaku dalam beberapa tahun terakhir ini. Fluktuasi harga banyak dipengaruhi oleh konsumsi CPO yang relatif lebih cepat dibanding dengan konsumsi minyak nabati lainnya. Faktor utama yang mendukung bahwa konsumsi CPO meningkat karena CPO merupakan minyak nabati termurah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Prospek harga minyak sawit di pasar dipengaruhi oleh tingkat harga substitusi harga minyak nabati lainnya, seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai.

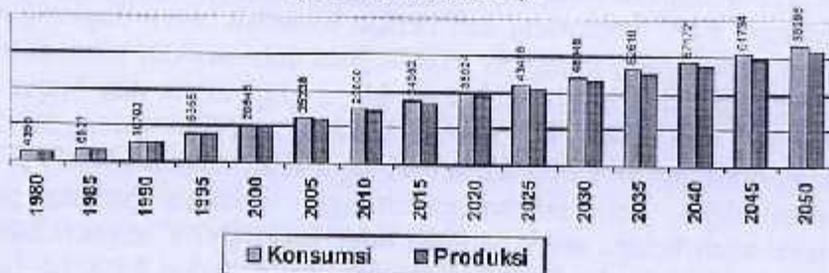
Peluang untuk pengembangan usaha agribisnis kelapa sawit masih terbuka luas pada hampir semua subsistem yaitu hulu dan hilir seperti ketersediaan lahan, tenaga kerja, teknologi. Dengan posisi sebagai produsen terbesar kedua di dunia, Indonesia perlu merespon peluang ke depan dengan lebih baik, mulai dari perencanaan sampai dengan menjaga agar tetap betahan pada posisi sebagai produsen besar. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengembangan industri sawit Indonesia. Memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir sebagai pilihan strategi dalam pengelolaan agribisnis kelapa sawit Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit tersebut diperlukan serangkaian kebijakan seperti kebijakan makro ekonomi, kebijakan industri, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pengembangan infrastruktur, kebijakan pengembangan kelembagaan, kebijakan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan pengembangan pertumbuhan agribisnis kelapa sawit dan kebijakan ketahanan pangan.

Kebutuhan dunia terhadap CPO meningkat pesat seiring dengan perkembangan peradaban manusia terutama pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi tersebut telah memacu perkembangan industri penghasil CPO dan industri yang menghasilkan produk CPO olahan, perkembangan yang terjadi telah pula meningkatkan iklim persaingan usaha di antara produsen CPO dunia mengingat CPO merupakan produk unggulan yang mampu menopang perekonomian dan sebagai industri penggerak pembangunan sektor pertanian khususnya serta pembangunan nasional pada umumnya.

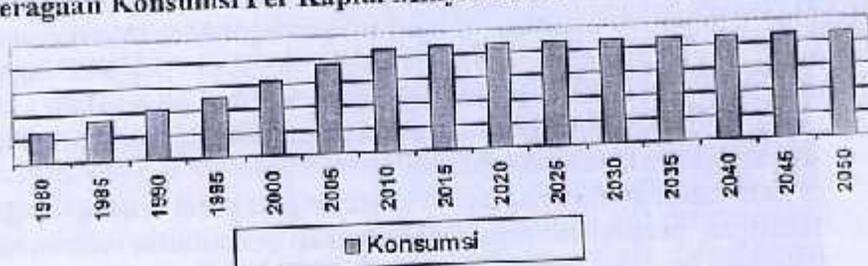
Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa proyeksi produksi minyak sawit meningkat sampai tahun 2050, seiring dengan meningkatnya konsumsi minyak sawit dunia. Pada tahun 2050 konsumsi minyak sawit mencapai 66.296 ribu ton. Ini menunjukkan angka yang sangat menggembirakan pelaku bisnis yang bergerak di bidang kelapa sawit. Selain itu masih banyak produk turunan dari komoditi kelapa sawit yang juga akan dibutuhkan konsumen baik domestik maupun internasional. Ini suatu tanda bahwa komoditi kelapa sawit dapat memberikan hasil yang begitu tinggi bagi negara penghasil kelapa sawit, seperti Indonesia. Lalu bagaimana dengan minyak sawit di Indonesia, dapat kita lihat pada gambar 8. Konsumsi minyak sawit di Indonesia juga menunjukkan angka yang positif, meningkat secara signifikan.

Gambar 7.
Keragaan Produksi dan Konsumsi Minyak Sawit dan
Proyeksinya (000 ton).



Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006, diolah

Gambar 8.
Keragaan Konsumsi Per Kapita Minyak Sawit dan Proyeksinya (Kg).



Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006, diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis finansial investasi perkebunan kelapa sawit skala besar (10.000 ha) layak untuk dilaksanakan karena manfaat yang diterima oleh investor lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. NPV perkebunan kelapa sawit sebesar US\$ 72,62 juta (*internal rate of return* sebesar 26,35%). Penerimaan perusahaan berasal dari hasil penjualan CPO dan KPO.

Dengan asumsi areal Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit berasal dari hutan konversi, maka perusahaan mendapatkan manfaat (keuntungan) dari hasil penjualan kayu IPK. Bila penerimaan (keuntungan) perusahaan yang berasal dari kayu IPK turut diperhitungkan dalam analisis finansial, NPV perkebunan kelapa sawit menjadi US\$ 93,62 juta. Keuntungan perusahaan yang berasal dari kayu IPK sangat besar dan diperoleh sebelum perusahaan melakukan investasi tanaman kelapa sawit, yaitu sebesar \$21 juta (atau \$2.100/ha), atau merupakan 22,5% dari total NPV.

Berdasarkan analisis valuasi ekonomi, yaitu dengan turut memperhitungkan total biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi, besarnya NPV tergantung dari berapa besarnya biaya lingkungan dan biaya sosial yang mungkin terjadi. Bila diasumsikan nilai minimum (yang dapat diterima) untuk total biaya lingkungan dan biaya sosial sebesar US\$ 458/ha maka besarnya NPV (dengan turut memperhitungkan keuntungan dari kayu IPK) adalah US\$ 53,73 juta. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan analisis pulang pokok, perkebunan kelapa sawit menjadi tidak layak (NPV negatif) bila total biaya lingkungan dan biaya sosial mencapai lebih dari \$ 900/ha. Dengan demikian, besarnya nilai total biaya lingkungan dan biaya sosial yang sebenarnya terjadi menentukan layak tidaknya investasi perkebunan kelapa sawit.

Dengan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit menyebabkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif antara lain menambah devisa negara, menyerap tenaga kerja, dapat memanfaatkan lahan tidur yang terlantar. Sedangkan dampak negatif antara lain menyebabkan munculnya serangan hama dan penyakit, perubahan aliran air permukaan tanah, meningkatnya erosi tanah, dan pencemaran lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida dalam jumlah yang banyak, berbagai dampak negatif lainnya terhadap *eco-function*, konflik sosial terjadi pada saat pembukaan areal (secara paksa, pembakaran). ancaman terhadap hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati ekosistem hutan hujan tropis Indonesia, menyebabkan jutaan hektar areal hutan konversi berubah menjadi lahan terlantar, penyebab utama bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pada kegiatan investasi perkebunan Kelapa Sawit Tidak hanya menilai analisa kelayakan finansial saja, tetapi harus melakukan valuasi ekonomi (memperhitungkan biaya lingkungan dan biaya sosial).

Saran

Perkebunan kelapa sawit sebaiknya dibangun pada areal lahan yang tidak produktif dan bukan pada areal hutan produksi konversi. Total biaya lingkungan yang harus dibayar sangat rendah bila areal perkebunan kelapa sawit dibangun pada areal lahan yang tidak produktif. Namun demikian, investasi perkebunan kelapa sawit tetap layak secara finansial. Disamping itu, perkebunan kelapa sawit yang dibangun pada areal lahan kritis menghasilkan NPV yang lebih tinggi dibandingkan nilai penggunaan lahan alternatif berupa kegiatan *mixed agroforestry system*. Oleh karena itu, konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit harus dihentikan.

Perlu dilakukan valuasi ekonomi pada kegiatan investasi perkebunan Kelapa Sawit, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan. 2000. Bahan ceramah dan diskusi. Komitmen Indonesia dan isu-isu internasional tentang kehutanan dan perkebunan. D-5. Rakernas 2000. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 26-29 Juni 2000.
- Casson, Anne, 1999. *The Hesistant Boom : Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in An Era of Economic Crisis and Political Change*. CIFOR. Indonesia.
- Hartwick, JM and Olewiler, ND. 1997. *The Economics of Natural Resource Use..Second Edition*. Page 179. Addison-Wesley Educational Publishers, Inc. USA.
- Heri Santoso, Edy Sigit Sutaria, Hasril H Siregar. 2006. Potensi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Dataran Tinggi. *Jurnal Kelapa Sawit Vol.14 No.2 2006*. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.
- Husni, Laila. 2006. *Kinerja Perusahaan Inti Rakyat Kelapa Sawit Di Sumatera Selatan : Analisis Kemitraan Dan Ekonomi Rumah tangga Petani*. Disertasi. IPB. Bogor.
- Ismawan. Indra. 1999. *Resiko Ekologis Di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, Media Pressindo. Yogyakarta.
- Kartodiharjo, H dan Jhamtani, H. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Equinox Publishing. Jakarta-Singapore.
- Kasper, W and Streit, M. 1999. *Institutional Economics. Social Order and Public Policy*. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Roby Fauzan dan Luqman Erningpraja. 2007. *Factor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kelapa Sawit di Perbatasan (Kasus UPT Simanggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timar)*. *Jurnal Kelapa Sawit Vol 15 No. 2 2007*. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.
- Statistik Perkebunan. 2008. *Statistik Perkebunan*. Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Teguh Wahyono. 2004. *Pengembang Sosial Ekonomi Regional Melalui Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Studi Kasus Kabupaten Kampar Riau*. *Jurnal Kelapa Sawit Vol 12 No. 1 2004*. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.
- _____. 2004. *Industri Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) di Indonesia Dari Sisi Ekonomi Makro Serta Kaitannya Dengan Program Penelitian dan Pengembangan*. *Jurnal Kelapa Sawit Vol 12 No. 1 2004*. Pusat penelitian Kelapa sawit. Medan.
- Van den Bergh, J.CJM. 1999. *Handbook of Environmental and Resource Economics*. Edward Elgar Publishing, Inc.